



Harmonisasi Wawasan Kebangsaan Anggota DPR RI *Incumbent*

Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung, membuka secara resmi kegiatan Harmonisasi Wawasan Kebangsaan Anggota DPR RI *incumbent* untuk Periode tahun 2014-2019 pada hari Selasa (5/8) di Gd. Dwi Warna Purwa Lemhannas RI.... (selengkapnya ke hal. 7...)

Menguatkan Kembali Pancasila Dan Meredam Radikalisme Global Di Indonesia



Foto : Humas Lemhannas RI

Deputi Bidang Pengkajian Strategik, Direktorat Pengkajian Internasional Bidang Kewaspadaan Nasional mengadakan *Round Table Discussion* (RTD) Aktual dengan tema “**Strategi Memperkuat Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dalam rangka Menghadapi Radikalisme Global**” pada hari Selasa (22/7). Acara ini dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., di Ruang Kresna Gd. Asta Gatra Lt. 4 dan didampingi oleh Wakil Gubernur Marsdya TNI Dede Rusamsi, S.E.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara nilai-nilainya kian memudar dalam kehidupan dewasa ini. Berbagai pengaruh globalisasi yang merambah ke Indonesia tidak sedikit menimbulkan pengaruh negatif dan mulai menyebar di tengah-tengah masyarakat. “Akibatnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa hanya mampu menyentuh tataran retorika semata dan semakin jauh dari nilai-nilai yang dikandungnya,” ucap Budi Susilo Soepandji.

Acara yang dimoderatori oleh Laksma TNI Dr. A. Yani Antariksa, S.E., S.H., M.M. ini menghadirkan narasumber ahli yang terkait dengan tema, yakni Prof. Dr. Kaelan, M.S. selaku Guru Besar Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta dan Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Drs. Ansyad Mbaai, M.M. selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dalam diskusi ini hadir pula Wawan H. Purwanto selaku Direktur Lembaga Pengembangan Kemandirian Nasional dan Mayjen TNI (Purn) Dr. Ir. I Putu Sastra Wingarta, S. IP., M. Sc. selaku Taprof Bidang Kewaspadaan Nasional Lemhannas RI yang bertindak sebagai penanggung utama paparan dari narasumber.

Penyebab utama hingga munculnya kaum-kaum radikal yang berujung pada terorisme menurut Ansyad Mbaai ialah karena adanya kaum minoritas yang terpinggirkan, ada seseorang atau kelompok memprovokasi, serta adanya ideologi radikal yang menjadi dasar tindakan-tindakan radikal. Untuk menanggulangi hal tersebut, ada empat strategi yang direkomendasikan dalam RTD ini, yakni melakukan deradikalisasi kaum fundamentalis, melindungi empati masyarakat Indonesia, membumikan Pancasila, dan merevitalisasi kewaspadaan nasional.

DAFTAR ISI

-  **2** Menguatkan Kembali Pancasila Dan Meredam Radikalisme Global Di Indonesia
-  **3** Dialog Kebangsaan: Peranan Perempuan Dalam Membangun Karakter Kebangsaan
-  **4** Talkshow Kebangsaan Lemhannas RI - LPP RRI
-  **5** Lemhannas RI Kaji Cyber Crime
-  **5** Halalbihalal Idul Fitri 1435 H Lemhannas RI
-  **6** Kekuatan Lemhannas RI Ada Pada Aluminya!
-  **6** Sosialisasi PPID Di Lingkungan Lemhannas RI
-  **7** Harmonisasi Wawasan Kebangsaan Anggota DPR RI Incumbent
-  **7** Syarif Hasan: Harmonisasi Kebangsaan, Bekal Untuk Tingkatkan Kualitas Anggota DPR RI Lemhannas RI Perkuat Karakter Kebangsaan Anggota DPR RI Baru Hasil Pileg 2014
-  **8** Media Massa, Penjaga Kedamaian Demokrasi Indonesia
-  **9** Serah-Terima Jabatan di Lingkungan Lemhannas RI
-  **10** Dialog Kebangsaan Dapat Memberikan Pencerahan Kepada Masyarakat
-  **10** Nurhayati Ali Assegaf : Implementasi Wawasan Kebangsaan Tergantung Individu Masing-Masing
-  **11** Gubernur Lemhannas RI: Introspeksi Diri Dan Perkuat Kesadaran Kolektif Bangsa
-  **12** Pertahanan Negara Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Perhitungan Material

REDAKSI

Pengarah :
Komjen Pol Boy Salamuddin
Penanggung Jawab :
Laksma TNI E. Estu Prabowo, M.Sc.
Redaktur :
Ir. Yusita Pusparini, M.Sc.
Penyunting/Editor :
Kolonel Laut (P) Maghoni.
Redaktur Pelaksana :
Trias Noverdi, S.S., Endah Heliana, S.Sos., Aditya Solehah S.Hum, Aska Leonard, M. I. Kom, Triana Rahmawaty, S.Hum.
Desain
Bambang Iman Aryanto, S.T.
Fotografer :
Suryadi, Dwi Jayanto
Sekretariat :
Linda Purnamasari S.Sos., Letkol Caj G.T. Situmorang, Gatot, Indiah Winarni.
Distribusi :
Letkol Inf. Sumurung, Lettu Cba Supriyono.
Alamat Redaksi :
Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110,
Telp. (021) 3832108, 3832109, Fax. (021) 3451926,
Website <http://www.lemhannas.go.id>

Dialog Kebangsaan: Peranan Perempuan Dalam Membangun Karakter Kebangsaan



Lemhannas RI mengadakan Dialog Kebangsaan bagi Istri Peserta Program Pemantapan Pemimpin Daerah Angkatan (P3DA) VIII, dengan tema **“Peranan Perempuan Dalam Membangun Karakter Kebangsaan,”** yang bertempat di Auditorium Mini Lt. 3 Gd. Astagatra Lemhannas RI pada Senin (21/7), pukul 20.00 s/d 21.00 WIB.

Pejabat Lemhannas RI yang hadir pada acara tersebut yakni Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., Wakil Gubernur, Marsdya TNI Dede Rusamsi, S.E., Deputy Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Laksda TNI Ir. Leonardi, Deputy Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Mayjen TNI M. Nasir Majid, Karo Humas Settama, Laksma TNI E. Estu Prabowo, M.Sc., Karo Kerja Sama Settama Lemhannas RI, Brigjen TNI Sudiby, S.E., Direktur Operasi Pendidikan Debiddikpimtiknas, Brigjen TNI Sudirman Kadir, Direktur Pengkajian Sosial Budaya Debidjianstrat, Brigjen Pol Drs. Bambang Sukamto, S.H., M.H.

Dalam acara ini dikatakan kaum perempuan memiliki peranan penting dan strategis dalam mewujudkan Ketahanan Nasional bangsa yang tangguh dan solid. Mendidik perempuan adalah mendidik bangsa serta generasi penerus. Dalam konteks Ketahanan Nasional Indonesia harus dibangun kesadaran kolektif bahwa kaum perempuan Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lain dalam membangun bangsanya.

“Wanita adalah tiang negara, bila baik seorang wanita maka baiklah negara, dan bila rusak seorang wanita maka rusaklah negara,”

jelas istri Wakil Walikota Salatiga, Ida Nurul Farida.

Istri Wakil Walikota Bandung, Siti Mumtazah menambahkan, “Saat ini kita melihat karakter yang dimiliki oleh generasi Indonesia sudah mulai pudar dengan adanya arus globalisasi, internet, dan televisi cukup menggerus karakter yang dimiliki oleh bangsa ini. Seperti memudarnya disiplin, kepedulian, serta berkurangnya gotong royong.”

Menurut Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji D.E.A., Dialog Kebangsaan dengan tema pemberdayaan perempuan, sekaligus menghadirkan narasumber yang keseluruhannya perempuan ini adalah yang pertama kalinya diselenggarakan oleh Lemhannas RI. Kegiatan ini juga disiarkan langsung oleh RRI, dengan Maulana Isnarto hadir sebagai moderator.

Pada acara tersebut juga dijelaskan saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada satu persoalan bersama. Disaat kita membutuhkan sebuah bangsa yang kuat, justru karakter-karakter yang dibutuhkan untuk membangun sebuah bangsa yang kuat tersebut mulai mengalami degradasi.

“Yang mengkhawatirkan bahwa saat ini anak sekolah sudah meluntur kecintaan kepada bangsa dan negaranya,” pungkas istri Wakil Walikota Majene, Hj. Fatmawati Fahmi. Melihat kondisi demikian, istri Wakil Bupati Cianjur, Hj. Minarsih menjelaskan bahwa untuk membentuk karakter kebangsaan yang tangguh dalam diri setiap anak bangsa, haruslah diterapkan pendidikan kebangsaan sejak usia dini.

Talkshow Kebangsaan Lemhannas RI - LPP RRI



Foto : Humas Lemhannas RI

“**B**egitu besar tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia, terutama di bidang politik yang mendapat pengaruh besar sekali dari luar. Diharapkan Presiden mendatang mampu mengatasinya,” jelas Sri Redjeki, perwakilan peserta PPRA LI dalam acara *talkshow* yang diselenggarakan atas kerjasama antara Lemhannas RI dengan LPP RRI Jakarta tersebut.

Talkshow yang berlangsung pada Rabu (23/7) dan bertempat di Studio Jusuf Ronodipuro, Jl. Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta ini menghadirkan narasumber Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji D.E.A., Dirut LPP RRI, Dra. Rosita Niken Widiastuti, M.Si. dan Tenaga Profesional Bidang Kewaspadaan Nasional Lemhannas RI, Mayjen TNI (Purn) I Putu Sastra Wingarta, perwakilan pejabat Lemhannas RI, perwakilan peserta PPRA LI, dan perwakilan peserta P3DA.

Talkshow bertema “**Lemhannas RI Menghadapi Tantangan Kebangsaan**” tersebut dimoderatori oleh penyiar RRI Jakarta Maulana Isnarto, serta disiarkan secara langsung pada pukul 11.30 sampai 13.00 melalui siaran terestrial serta media online RRI, yakni Pro 3 RRI FM 88,8 mhz, dan www.rri.co.id.

“Yang diperlukan adalah harus ada sebuah re-desain terhadap seluruh konsep yang secara nasional ini terstruktur sampai kepada wilayah Indonesia dengan tidak menjustifikasi Jakarta sebagai tolok ukur Indonesia. Tapi harus melihat sesuatu yang secara *bottom up* juga tumbuh dari wilayah-wilayah termasuk wilayah terluar dan terdepan dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Wakil Bupati Buru Selatan, Buce Ayub Saleky.

la melihat Pancasila dan UUD NRI 1945 masih menjadi kekuatan utama bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan kebangsaan terutama di tahun 2015 mendatang, dimana bangsa Indonesia tidak bisa mengelak dari kesepakatan **Asean Community**. “Kami berharap supaya seluruh pejabat-pejabat di negara ini harus

dididik melalui sebuah kurikulum nasional, dan itu embrionya harus dimulai dari Lemhannas RI,” kata Ayub Saleky menambahkan.

Senada dengan Wakil Bupati Buru Selatan, Bupati Kabupaten Paniai, H. Kayame, SH, MH., mengungkapkan bahwa banyak manfaat yang diperoleh dalam menjalani pendidikan di Lemhannas. Menurutnya, selama memimpin Kabupaten Paniai, dia beranggapan bahwa pemikirannya dalam menyelenggarakan pemerintahan adalah selalu benar. Namun setelah mendapat pembekalan di Lemhannas, maka terjadi perubahan pola pikir. Bahwa dalam mengelola daerah, harus in line dengan pemerintah pusat termasuk juga dengan pemerintah Provinsi Papua. Bahwa Pemerintah pusat memiliki satu tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara nasional yang harus didukung dari semua pemerintah daerah. Dia juga menyampaikan tentang pentingnya seluruh pejabat daerah atau siapapun yang akan menduduki jabatan di pemerintahan, harus mendapat pendidikan di Lemhannas RI.

Talkshow ini juga melibatkan partisipasi pendengar yang disampaikan melalui telepon maupun pesan singkat/sms. Pertanyaan pendengar, antara lain tentang kemampuan Lemhannas menjamin bahwa alumninya tidak melakukan tindakan korupsi yang ditanggapi langsung secara mantik oleh Gubernur Lemhannas RI.

Di akhir acara, Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji D.E.A. menyimpulkan bahwa kerusakan fisik itu lebih mudah diperbaiki daripada kerusakan karakter dan moral. Budi Susilo Soepandji pun mendapat banyak sumbang saran pada penyelenggaraan diskusi kebangsaan tersebut demi penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan. Semua masukan yang didapat ini nantinya akan menjadi catatan, baik pribadi maupun untuk Lemhannas RI.

Lemhannas RI Kaji *Cyber Crime*

Dalam mengantisipasi adanya kejahatan di dunia maya, Deputi Pengkajian Lemhannas RI mengadakan *Round Table Discussion* (RTD) dengan tema “**Antisipasi Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*) Guna Memantapkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam rangka Ketahanan Nasional**” pada Rabu (23/7) di Ruang Kresna Gd. Astagatra Lt. 4 Barat. Diskusi ini dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. yang didampingi oleh Wakil Gubernur Marsdya TNI Dede Rusamsi, S.E. dan Deputi Pengkajian Strategik Irjen Pol Boy Salamuddin.

Dalam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI menyatakan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat di zaman ini seperti pisau bermata dua. Di satu sisi dapat mempermudah arus komunikasi dan mempercepat sampainya informasi tetapi di sisi lain juga dapat memberikan banyak dampak negatif kepada penggunaannya seperti *malware*, penyebaran virus komputer, hingga pencurian identitas untuk disalahgunakan. “Dampak negatif tidak bisa diabaikan dan harus segera menyusun regulasi untuk mengatur penegakkan hukum *cyber* di Indonesia yang sesuai dengan UU internasional,” ujar Budi Susilo Soepandji.

Sebagai narasumber dalam acara ini adalah Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo RI Ir. Bambang Heru Tjahyono, M.Sc., Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer/Anggota Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas) Prof. Zainal A. Hasibuan, Ir., M.L.S., Ph.D., dan Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Mabes Polri Brigjen Pol Drs. A. Kamil Razak, S.H., M.H. Diskusi yang dimoderatori oleh Komjen Pol (Purn) Drs. Togar M. Sianipar, M. Si. Ini juga menghadirkan beberapa ahli sebagai penanggap, antara lain Direktur Network, IT, and Solution, PT. Telekomunikasi Indonesia



Foto : Humas Lemhannas RI

Tbk Rizkan Chandra, Ketua Komtap *Network Security and Cyberspace Technology* Kadin Indonesia Sylvia W. Sumarlin, dan Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A.

Dalam diskusi ini, para narasumber sepakat bahwa ada berbagai macam kejahatan yang menyebar melalui internet dan mengancam ketahanan nasional Republik Indonesia. Ancaman itu mengancam berbagai sendi kehidupan, seperti dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Beberapa rekomendasi solusi yang terlontar dalam diskusi ini antara lain membangun data center mandiri di Indonesia, membangun pasukan *cyber* yang dapat menanggulangi bila terdapat serangan ke dalam *website-website* dalam negeri, serta perlunya dilakukan sertifikasi untuk menjamin keamanan transaksi informasi pada *website-website* pemerintah untuk mencegah bocornya informasi ke negara lain.

Halalbihalal Idul Fitri 1435 H Lemhannas RI

Seluruh anggota Lemhannas RI beserta peserta pendidikan PPRA 51 dan PPRA 52 pada Senin pagi (4/8), mengikuti acara *halalbihalal* yang dipimpin oleh Gubernur Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. di lapangan tengah Lemhannas RI.

Dalam kesempatan tersebut, Budi Susilo Soepandji selaku Gubernur Lemhannas RI berharap dalam suasana Hari Raya Idul Fitri tersebut, seluruh keluarga besar Lemhannas RI dapat saling bermaafan. Selain itu, Gubernur juga mengingatkan beberapa agenda Lemhannas RI yang harus menjadi perhatian bagi seluruh anggota usai cuti bersama dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Fitri 1435 H.

Usai hari raya, Lemhannas RI akan melaksanakan program barunya yang dirancang khusus untuk Pemilihan Umum 2014 yang telah digelar pada 9 April dan 9 Juli lalu. Lembaga ini akan melaksanakan program pendidikan yang ditujukan untuk para anggota DPR terpilih yang akan menjalankan tugas dan fungsinya dalam lima tahun kedepan. Melalui program yang dirancang khusus ini, Lemhannas RI berharap anggota DPR RI semakin mumpuni dalam

berpikir dan bersikap sebagai negarawan, memiliki pengetahuan dan wawasan strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, legislasi, serta anggaran. Usai pelaksanaan apel tersebut, seluruh anggota dan peserta pendidikan yang hadir saling bermaaf-maafan dan bersalaman.



Foto : Humas Lemhannas RI

Kekuatan Lemhannas RI Ada Pada Alumninya!



Program Pemantapan Pemimpin Daerah Angkatan (P3DA) VIII yang dimulai sejak 6 Maret lalu akhirnya ditutup pada hari Kamis (24/7) di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI.

Acara yang dipimpin oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandi, D.E.A., dihadiri oleh para Pejabat Struktural, Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji, dan Tenaga Profesional Lemhannas RI. Selain itu, dalam upacara penutupan ini turut hadir Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko.

Saat ini Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu menyikapi secara cerdas dan mampu merumuskan upaya terobosan di daerah yang dipimpinnya untuk membangun ekonomi daerah yang bermartabat.

Alumni P3DA VIII yang menempuh pendidikan selama 2,5 bulan di Lemhannas RI ini, diharapkan dapat menjadi pemimpin yang mampu mengemban amanah yang diberikan rakyatnya dengan baik dalam memajukan dan menyejahterakan daerah dan rakyatnya.

Dalam upacara penutupan ini, Budi Susilo Soepandi mengungkapkan rasa kagumnya akan komitmen para alumni yang bertekad akan terus menjaga tali silaturahmi dengan mengadakan pertemuan-pertemuan rutin di masa mendatang.

“Kekuatan Lemhannas RI berasal dari para alumninya dan kami di Lemhannas RI sangat mendukung upaya tersebut dengan terus berusaha menyediakan sarana demi kemajuan dan upaya pemeliharaan ilmu serta rasa persatuan dan kesatuan itu,” tutup Gubernur Lemhannas RI.

P3DA VIII tahun 2014 ini diikuti oleh 34 pimpinan daerah, yang terdiri dari 12 orang bupati, 9 orang wakil bupati, 3 walikota, 7 wakil walikota, dan 3 ketua DPRD Kabupaten/Kota.

Sosialisasi PPID Di Lingkungan Lemhannas RI

Dalam rangka sosialisasi pentingnya pengelolaan informasi Lemhannas RI, Biro Hubungan Masyarakat Lemhannas RI mengadakan Sosialisasi UU Keterbukaan Informasi Publik pada Senin (11/8) di Ruang Gajah Mada Gd. Pancagatra Lt. 3. dengan menghadirkan Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono. Acara yang dibuka oleh Sekretaris Utama Irjen Pol Boy Salamuddin ini, diharapkan dapat menambah tingkat kepedulian dari seluruh unsur pimpinan lembaga dan segenap anggota Lemhannas RI, sehingga meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi di lingkungan Lemhannas RI.

Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada dasarnya membawa banyak perubahan terhadap pengelolaan informasi pada seluruh lembaga pemerintah. Salah satu diantaranya ialah mengenai keterbukaan informasi kepada publik (masyarakat) yang sebelum penerapan UU ini, hampir seluruh informasi yang dimiliki oleh Badan Publik (BP) merupakan informasi tertutup dan tidak dapat diketahui umum. Namun, dengan diberlakukannya UU KIP yang resmi dilaksanakan pada tanggal 30 April 2010, hampir seluruh informasi BP merupakan informasi yang terbuka bagi masyarakat umum.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan pelaksana langsung dari penerapan UU KIP di BP. Secara umum, terdapat empat fungsi PPID, yakni fungsi manajemen, pelayanan (*servicing*), penanganan/pengelolaan sengketa dan melindungi pimpinan BP. Dengan tanggung jawab tersebut, para petugas PPID memiliki kewenangan untuk mengakses informasi lintas sektor agar kebutuhan masyarakat akan informasi BP senantiasa terpenuhi.

Dalam acara ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Laksma TNI E. Estu Prabowo, M. Sc. menyampaikan kemajuan yang dicapai PPID Lemhannas RI yang baru dibentuk pada tahun 2013, dimana seluruh target yang ditetapkan, telah disampaikan kepada tim monitoring pelaksanaan PPID nasional secara tepat waktu dan tepat sasaran.



Harmonisasi Wawasan Kebangsaan Anggota DPR RI Incumbent

Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung, membuka secara resmi kegiatan Harmonisasi Wawasan Kebangsaan Anggota DPR RI *Incumbent* untuk Periode tahun 2014-2019 pada hari Selasa (5/8) di Gd. Dwi Warna Purwa Lemhannas RI. Program kerjasama Lemhannas RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI yang berlangsung selama empat hari ini diharapkan semakin memperkuat karakter dan wawasan kebangsaan para wakil rakyat terpilih.

"Program ini merupakan tindak lanjut dari program-program dialog kebangsaan yang sebelumnya ditujukan pada anggota partai politik. Dengan merengkuh tataran yang lebih tinggi, yakni anggota DPR RI, Lemhannas optimis bahwa pesan dan pemahaman akan wawasan kebangsaan akan lebih sampai sehingga langsung dapat diimplementasikan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan," ujar Gubernur Lemhannas RI.

Mengenai metode yang digunakan dalam program ini, Budi Susilo Soepandji menyatakan bahwa dengan cara dialog, diskusi dan ceramah, pengetahuan tentang pengertian wawasan kebangsaan akan semakin kaya. "Kolaborasi antara tenaga pengajar, tenaga pengkaji, dan tenaga profesional yang dimiliki Lemhannas dan ditambah dengan pengalaman di lapangan para anggota DPR, kami yakin bahwa program ini akan bisa memberikan cara pandang yang lebih luas lagi dalam menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan yang kini kita hadapi," tutupnya.

Sepakat dengan pernyataan Budi Susilo Soepandji, Pramono Anung berharap bahwa acara serupa yang bertujuan meningkatkan wawasan kebangsaan bagi para anggota DPR dapat terus diselenggarakan secara rutin, "Kalau bisa diadakan bukan hanya saat setelah pemilu, tetapi dilaksanakan dua kali dalam setahun." Wakil Ketua DPR ini yakin bahwa pengertian tentang wawasan kebangsaan dapat memberikan pengetahuan lebih bagi anggota DPR RI yang salah satu tugas utamanya adalah membuat undang-undang.

Pada satu kesempatan, Edhie Baskoro Yudhoyono selaku peserta menunjukkan antusiasnya dalam mengikuti program ini. "Saya sangat menghargai usaha yang dilakukan oleh Lemhannas dan DPR RI yang melakukan semacam penyegaran harmonisasi wawasan kebangsaan" katanya. Bagi Ibas, begitu ia kerap disapa, kegiatan ini menjadi penting bagi bakal calon anggota legislatif untuk lebih mengenal bangsa, lebih mencintai dan menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia."

Apresiasi senada juga diutarakan Dede Yusuf. "Menurut saya apa yang diprakarsai oleh Lemhannas dan Komisi I DPR RI untuk memberikan wawasan kebangsaan ini, sangat penting sekali," jelas Dede. Namun menurutnya, waktu penyelenggaraan terlalu singkat



Foto : Humas Lemhannas RI

bila hanya dilaksanakan selama empat hari. Akan lebih efektif bila lebih lama dengan disertai kegiatan *outbound*, demikian saran yang diajukan Dede Yusuf. Kegiatan ini, katanya lagi, harus pula diberikan kepada para pejabat negara. Dalam pandangannya, para pembuat kebijakan pun harus memahami wawasan kebangsaan dengan baik.

Ada dua program yang akan dilaksanakan Lemhannas RI untuk para wakil rakyat yang akan menjabat lima tahun kedepan, yang pertama ialah Harmonisasi Kebangsaan, Pembekalan dan Pemanjapan Pemimpin Tingkat Nasional Anggota DPR RI *Incumbent*, sedangkan program Pembekalan dan Pemanjapan Pemimpin Tingkat Nasional ditujukan untuk para anggota DPR terpilih hasil pemilu legislatif tahun 2014.

Syarief Hasan: Harmonisasi Kebangsaan, Bekal Untuk Tingkatkan Kualitas Anggota DPR RI

Anggota DPR RI periode 2014 -2019, Syarif Hasan yang juga saat ini menjabat Menteri Negara Koperasi dan UKM RI pada Kabinet Indonesia Bersatu II, menanggapi kegiatan Harmonisasi Kebangsaan sangat penting untuk meningkatkan kualitas anggota DPR RI. "Perlu sekali, bagi yang sudah berpengalaman mengingatkan kembali. Bagi yang baru, ini merupakan bekal yang paling bagus, sehingga kualitas dari para anggota DPR itu betul-betul sesuai yang diharapkan oleh rakyat," jelas Syarif.



Foto : www.inilah.com/data/berita/foto/2071838.jpg

Ia juga menilai kegiatan Harmonisasi Kebangsaan seharusnya sudah dilaksanakan sejak dulu. "Saya pikir ini suatu pelatihan atau suatu pengarahan pembekalan yang bagus. Seharusnya dari dulu dari periode sebelumnya," kata Syarif.

Kegiatan Harmonisasi Kebangsaan ini diharapkan dapat menghasilkan pemimpin tingkat nasional yang memiliki karakter kebangsaan yang tinggi dan kompeten di bidangnya serta mampu mengimplementasikan paradigma nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Lemhannas RI Perkuat Karakter Kebangsaan Anggota DPR RI Baru Hasil Pileg 2014



Foto : Humas Lemhannas RI

Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. dengan didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, membuka secara resmi kegiatan pembekalan dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi Anggota DPR RI yang baru terpilih untuk periode tahun 2014-2019, di auditorium Gd. Dwi Warna Purwa, pada Senin (11/8). Program khusus yang akan berlangsung dari tanggal 11-29 Agustus 2014 ini, diharapkan dapat membentuk dan memperkuat karakter negarawan pada wakil rakyat yang baru.

Dalam sambutannya, Budi Susilo Soepandji menegaskan agar bangsa ini jangan sampai terjebak dalam euforia demokrasi yang bergerak menjauh dari Pancasila sebagai jati diri bangsa. "Hal ini penting, mengingat peran anggota DPR RI dalam membangun kehidupan bermasyarakat, yang beretika, dan bermartabat," jelas Gubernur Lemhannas RI.

Senada dengan pernyataan Budi Susilo Soepandji, Priyo Budi Santoso berharap agar kegiatan ini mampu memberikan bekal wawasan kebangsaan kepada para anggota DPR RI periode 2014-2019 yang baru pertama kali melenggang ke Senayan. "Mereka benar-benar baru dalam politik, jadi penting untuk dibekali dengan nilai-nilai kebangsaan, patriotisme, nasionalisme, persatuan nasional, dan lain sebagainya," ujarnya.

Dari kegiatan pembekalan ini, DPR RI sebagai lembaga legislatif, diharapkan selalu berkomitmen dalam implementasi nilai-nilai luhur Pancasila ketika merumuskan kebijakan. "Nilai-nilai Pancasila peninggalan nenek moyang kita tidak boleh tergerus hanya karena friksi politik, caranya adalah dengan dibekali semacam ini," tambah Budi Santoso.

Metode yang digunakan untuk pembekalan kali ini berbeda dengan program bagi anggota DPR RI yang terpilih kembali. Pembekalan ini dilaksanakan dalam tiga gelombang selama 15 hari, yang dilaksanakan pada 11 - 29 Agustus 2014, 18 Agustus - 5 September 2014, dan 25 Agustus - 12 September 2014. Kegiatan dilaksanakan dengan ceramah, diskusi, dialog, pembinaan peserta, dan *outbound*.

Sebanyak 47 Anggota DPR RI hadir pada pembukaan kegiatan ini, yang masing-masing terdiri dari 4 orang berasal dari Hanura, 4 orang berasal dari Golkar, 2 orang berasal dari PPP, 5 orang berasal dari PAN, 5 orang berasal dari PKB, 3 orang berasal dari PDIP, 11 orang berasal dari Demokrat, dan 13 orang berasal dari Gerindra. Pembekalan dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan ini merupakan program khusus yang dirancang bersama oleh Lemhannas RI dengan Sekretariat Jenderal DPR RI adalah untuk membekali dan menambah wawasan kebangsaan para anggota baru DPR RI periode 2014-2019.

Media Massa, Penjaga Kedamaian Demokrasi Indonesia

Biro Hubungan Masyarakat Lemhannas RI mengadakan acara *Coffee Morning* dengan para wartawan, reporter dan redaktur media massa pada Rabu (13/8) di Gd. Trigatra Lt.1. Acara yang dipandu oleh Kepala Biro Humas Laksma TNI E. Estu Prabowo ini menghadirkan Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, Deputy Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Laksda TNI Ir. Leonardi, dan Deputy Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Mayjen TNI M. Nasir Majid sebagai narasumber. Ketiga narasumber yang hadir menjelaskan beberapa agenda serta program Lemhannas RI dalam waktu dekat untuk menjawab tantangan saat ini.

Peran Lemhannas RI pada tahun politik ini, adalah melaksanakan program Pembekalan dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan yang ditujukan kepada wakil-wakil rakyat yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Yang menarik dalam program ini ialah komitmen yang dibuat oleh para anggota DPR di akhir masa pendidikannya di Lemhannas RI. Komitmen tertulis yang dirumuskan sendiri oleh mereka akan ditandatangani dan dibacakan secara bersama-sama pada penutupan program supaya mereka ingat dan menepatinya dalam menjalankan tugas negara di kursi DPR nanti,” ujar Budi Susilo Soepandji.

Peran media di Indonesia sekarang ini sangat strategis dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Kebebasan media yang



hingga saat ini dimanfaatkan dalam menyebarkan berita sangat bermanfaat dalam mendidik dan mendewasakan masyarakat di negara yang demokratis.

Namun, menurut Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Tarman Azam, kebebasan pers yang hampir tak terbatas sekarang ini jangan sampai mengorbankan kedamaian dan kepentingan bangsa sendiri. Kerja sama Lemhannas RI dengan media yang dibangun dengan hubungan baik adalah salah satu langkah lembaga ini untuk menyebarkan program-program positif pemerintah ke khalayak banyak.

Serah-Terima Jabatan Di Lingkungan Lemhannas RI

Bertempat di Ruang Nusantara I, Lemhannas RI mengadakan acara serah terima jabatan, pelantikan, dan pelepasan bagi pejabat eselon I, II, dan III yang dipimpin langsung oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. Acara tersebut diselenggarakan pada Kamis (14/8) di Ruang Nusantara, Gd. Trigatra Lt. I, Lemhannas RI.

Tiga pejabat baru yang dilantik yaitu Brigjen TNI Danu Nawawi, S.Sos., sebagai Tenaga Ahli Pengajar Bidang Geostrategi



dan Ketahanan Nasional, yang sebelumnya menjabat Kepala Staf Daerah Militer (Kasdam) IX/UDY. Kedua ialah Agus Budiarto, M.H. sebagai Direktur Pengkajian Internasional setelah sebelumnya bertugas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Pejabat ketiga yang dilantik ialah Letkol Inf Surana, S.E., M.Sc., sebagai Kasubdit Evaluasi dan Pengembangan Ditprog Bangtapp Debidtplaikbs Lemhannas RI.

Selain itu, terdapat dua pejabat Lemhannas RI yang akan dimutasikan ke satuan kerja lain yaitu Mayjen TNI Setyo Sularso yang semula menjabat sebagai Tenaga Ahli Pengajar Bidang Geostrategi dan Ketahanan Nasional Lemhannas RI menjadi Kas Kostrad dan Tony Tribagus Spontana, S.H., M.Hum., dari Direktur Pengkajian Internasional Lemhannas RI menjadi Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung.

Lemhannas RI senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas para anggotanya dengan berbagai pelatihan, seminar, pemberian beasiswa bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, juga dengan mutasi pegawai. Hal ini dilakukan demi semakin meningkatnya mutu hasil kajian, pendidikan, pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang secara berkala diadakan lembaga ini.

Dialog Kebangsaan Dapat Memberikan Pencerahan Kepada Masyarakat



Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsdya TNI Dede Rusamsi, S.E. berharap agar Dialog Kebangsaan bidang politik yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI pada Kamis (14/8) dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia di dalam tatanan bagaimana mendewasakan pandangan politik.

Dialog Kebangsaan yang disiarkan secara langsung oleh TVRI serta dipandu moderator, Maulana Isnarto ini berlangsung di Gd. Pancagatra Lt. 3 dengan mengusung tema "Membangun Sistem Demokrasi Indonesia."

Dalam dialog tersebut, Tenaga Pengajar Bidang Politik Lemhannas RI, Kisnu Haryo SH. MA. mengatakan terpaan globalisasi akan berdampak kepada rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan

masyarakat. "Tidak bisa dinafikan, bangsa Indonesia sekarang ini berada di dalam arus global. Arus ini akan membawa nilai-nilai yang nantinya membawa dampak kepada nilai-nilai asli bangsa Indonesia," kata Kisnu.

Untuk mengantisipasi, Kisnu menjelaskan perlunya mempersiapkan sistem ketatanegaraan, serta menata sistem politik Indonesia. "Bangsa kita harus mempunyai konsep kenegaraan yang dilandasi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari 4 konsensus dasar," tambah Kisnu.

Perlunya menata sistem politik di Indonesia juga, diamini oleh perwakilan dari DPP Gerindra, Glenny Kairupan, yang mencontohkan maraknya konflik yang terjadi setelah penyelenggaraan pilkada di berbagai daerah. "Apa yang terjadi sekarang setelah pilkada, itu banyak terjadi konflik," kata Glenny.

Menurut Peneliti LIPI, Siti Zuhro, upaya yang harus dilakukan adalah bagaimana membumikan Pancasila hingga sampai ke tataran "akar rumput." "Keberpihakan demokrasi adalah untuk kepentingan rakyat. Selama ini masih berpihak kepada elit penguasa," jelas Siti.

Pada Dialog Kebangsaan ini turut hadir pula Deputy bidang Pendidikan Lemhannas RI, Laksda TNI Ir. Leonardi M.Sc, Kepala Biro Humas Lemhannas RI, Laksma TNI E. Estu Prabowo M.Sc, Drs. Edijan Tanjung M.Si, H. Ario Widjanarko SH. M.Sc, serta Anggota Kehormatan PWI, Tarman Azzam.



Nurhayati Ali Assegaf : Implementasi Wawasan Kebangsaan Tergantung Individu Masing-Masing

Dalam pelaksanaan pembekalan wawasan kebangsaan bagi anggota DPR RI yang terpilih kembali, beberapa peserta menyatakan persepsi positif atas tujuan kegiatan ini. Salah satu yang berhasil diwawancarai adalah anggota DPR RI dari Partai Demokrat periode 2014-2019, Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si., MP yang menyampaikan tentang langkah nyata pasca pembekalan.

Tentang implementasi kegiatan Harmonisasi Wawasan Kebangsaan, menurut Nurhayati Ali Assegaf, ilmu apapun yang diperoleh, semua kembali kepada masing-masing individu anggota DPR RI dalam mengimplementasikannya. "Itu kan tergantung bagaimana kita. Ilmu apa pun, dapat dari mana, tergantung individu masing-masing, mau atau tidak," jelas Nurhayati.

Anggota Komisi I DPR RI urusan luar negeri, pertahanan, dan komunikasi ini mengapresiasi penuh kegiatan yang diselenggarakan

oleh Lemhannas RI di Gd. Dwi Warna Purwa tersebut. "Saya kira bagus ya, supaya memberikan bekal kepada anggota mengenai gambaran yang perlu mereka mengerti seperti geopolitik, terutama ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan," jelasnya.

Mengenai komitmen kebangsaan yang akan dibuat oleh anggota DPR RI pada akhir kegiatan Harmonisasi Wawasan Kebangsaan, Nurhayati menegaskan secara individu komitmennya adalah mengabdikan kepada bangsa dan negara. "Komitmen saya menjadi anggota dewan itu karena ingin mengabdikan kepada bangsa dan negara," tegas Nurhayati.

Untuk Harmonisasi Wawasan Kebangsaan bagi anggota DPR RI yang baru terpilih, anggota DPR RI periode 2009-2014 ini menyarankan agar kegiatan tersebut diselenggarakan tidak dalam waktu yang singkat. "Yang baru saya kira lebih lama, karena belum ada pengalaman. Kemarin dan ini saya kira terlalu singkat sebetulnya," ujar Nurhayati sambil mengakhiri percakapan.

Gubernur Lemhannas RI: Introspeksi Diri Dan Perkuat Kesadaran Kolektif Bangsa

Pada tanggal 17 Agustus 2014, Lemhannas RI melaksanakan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Kemerdekaan RI yang diikuti oleh para pejabat Lemhannas RI, peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 51 dan segenap anggota Lemhannas RI.

Bertempat di lapangan tengah Lemhannas RI, Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. bertindak selaku Inspektur Upacara. Dalam acara yang berlangsung khidmat tersebut, Gubernur Lemhannas RI mengimbau kepada seluruh peserta upacara untuk memanfaatkan momentum peringatan HUT ke-69 Kemerdekaan RI tersebut guna melakukan introspeksi diri dan memperkuat kembali kesadaran kolektif bangsa dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, yaitu, menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Peringatan proklamasi kemerdekaan ke-69 ini mengambil tema "Dengan semangat proklamasi 17 agustus 1945, kita dukung suksesi kepemimpinan nasional hasil pemilu 2014 demi kelanjutan pembangunan menuju Indonesia yang makin aman, maju dan sejahtera". Terkait dengan tema tersebut, Budi Susilo Soepandji menekankan tentang pentingnya faktor kepemimpinan nasional dalam menentukan eksistensi, keberlangsungan dan masa depan bangsa.

"Kita dapat melihat bahwa perjuangan dan kokohnya eksistensi bangsa, hanya diperoleh ketika kepemimpinan nasional mendapat dukungan sepenuhnya dari segenap komponen bangsa", ungkap Gubernur Lemhannas RI dalam sambutannya.

Dari perspektif ketahanan nasional, tidak dapat dihindari, bahwa kepemimpinan nasional mendatang, akan dihadapkan pada



isu strategis yang mencakup delapan gatra kehidupan nasional, yaitu aspek geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan.

Di akhir sambutannya, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan lima hal yang perlu dipedomani oleh seluruh jajaran Lemhannas RI, yaitu untuk:

1. Meningkatkan kualitas iman dan takwa personel Lemhannas RI beserta keluarga;
2. Meningkatkan kualitas etika dan moral seluruh jajaran Lemhannas RI dalam kehidupan sosial kemasyarakatan maupun dalam pelaksanaan tugas;
3. Meningkatkan kinerja dan kualitas pelaksanaan tugas Lemhannas RI yang berorientasi pada kepentingan bangsa;
4. Menjadi ujung tombak pengembangan wawasan kebangsaan yang berlandaskan empat konsensus dasar bangsa melalui lingkungan keluarga, lingkungan pemukiman dan lingkungan kerja; dan
5. Bekerja sama dan berkolaborasi antara setiap unit kerja dan seluruh jajaran Lemhannas RI di berbagai strata.

Pertahanan Negara Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Perhitungan Material



Foto : Humas Lemhannas RI

Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, “Ada yang tidak bisa kita bandingkan dengan satu perhitungan material, bahwa pertahanan negara itu tidak bisa kita hitung dengan angka-angka rupiah,” dalam ceramah umum pada kegiatan Pembekalan dan Pematapan bagi Anggota DPR RI Periode 2014-2019, Rabu (20/8).

Selanjutnya, Sjafrie menjelaskan pertahanan negara sangat diperlukan sebab menyangkut kedaulatan dan keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan negara Indonesia. “Ketiga hal ini tidak bisa kita hitung dengan nominal anggaran belanja negara, walaupun diatur dalam anggaran belanja negara,” jelas Sjafrie.

Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI ini, Sjafrie Sjamsoeddin juga menjelaskan manfaat pertahanan negara terutama untuk kepentingan nasional, yakni pembangunan, dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. “Nah inilah yang menjadi penopang dari pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kuat,” kata Sjafrie.

Menurutnya, terdapat empat parameter yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur NKRI yang kuat, yakni parameter politik nasional

yang bermartabat, ekonomi nasional yang menjangkau kebutuhan rakyat, pertahanan negara yang tangguh, serta membangun soliditas bangsa yang kokoh.

“Tanggung jawab dari legislatif untuk mengangkat derajat dan martabat politik nasional Indonesia, tanggung jawab yang berkaitan dengan fungsi anggaran, dan secara mikro berkaitan dengan anggaran pertahanan nasional untuk membangun pertahanan negara yang unggul, serta membangun soliditas bangsa yang kokoh,” ungkap Sjafrie.

Sjafrie menambahkan, kekuatan ekonomi, serta kekuatan politik yang bermartabat, tidak akan mempunyai arti apabila Indonesia tidak mempunyai kekuatan pertahanan negara yang tangguh, serta soliditas bangsa yang kokoh dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Kegiatan ini berlangsung di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI, dan dimoderatori oleh Deputy bidang Pendidikan Lemhannas RI, Laksda TNI Ir. Leonardi M.Sc dan diikuti oleh sekitar 30 anggota legislatif terpilih pemilu 9 April 2014.



REDAKSI NEWSLETTER

LEMHANNAS RI

MENGUCAPKAN

“SELAMAT HARI ULANG TAHUN KE - 69

KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA”

Jayalah Bangsaku

